



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2020



KEBUMEN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 telah selesai disusun. LKjIP ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu agenda besar reformasi birokrasi. Penyusunan LKjIP ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam memenuhi tuntutan perubahan tatanan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.


LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah disesuaikan dengan format LKjIP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal yang menjadi pokok bahasan dari format penyajian LKjIP adalah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 diukur dengan capaian substantif indikator kinerja sarannya. Sehingga informasi yang disajikan dalam LKjIP ini berusaha untuk mengungkapkan tentang kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi keberhasilan dan kekurangberhasilan atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharap ridho-Nya, mudah-mudahan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kebumen,      Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	2
1.4. Sumber Daya Sekretariat Daerah .....	3
1.5. Sistematika Penyusunan LKjIP .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Aspek Perencanaan .....	6
2.2. Rencana Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	18
3.3. Realisasi Anggaran .....	68
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1. Kesimpulan .....	69
4.2. Solusi .....	70
LAMPIRAN .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	10
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	16
Tabel 3.2 Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pembinaan Kepemudaan.....	19
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia .....	23
Tabel 3.4. Realisasi Persentase BUMD Berpredikat Sehat.....	27
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Persentase BUMD Berpredikat Sehat Tahun 2016-2020 .....	27
Tabel 3.6 Daftar BUMD Kabupaten Kebumen.....	28
Tabel 3.7 Deviden yang Disetorkan BUMD (Audited).....	30
Tabel 3.8 Pertumbuhan Aset BUMD (Audited).....	31
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM .....	32
Tabel 3.10 Progres Penyaluran KUR, UMi dan Super Mikro di Kab. Kebumen .....	34
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Terkoordinasinya Distribusi BBMG dan Pupuk .....	36
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Prosentase Wilayah Distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi Tahun 2016-2020 .....	37
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Kabupaten dan Desa Sesuai Dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan serta Budaya Hukum Masyarakat .....	39
Tabel 3.14 Wilayah Sasaran yang Dilakukan .....	40
Tabel 3.15 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terasilitasi.....	42
Tabel 3.16 Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan .....	44
Tabel 3. 17 Kegiatan Penunjang Indikator Sasaran Prosentase Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga yang Sesuai Kebutuhan.....	45
Tabel 3.18 Kegiatan Penunjang Indikator Sasaran Prosentase Penyelenggaraan Urusan Perlengkapan dan Penataan Aset yang Sesuai Kebutuhan (Mencapai Target) .....	46
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang .. .....	47
Tabel 3.20 Kegiatan Penujang Indikator Sasaran Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.....	48
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Meningkatnya Efektifitas dan Efisien Kelembagaan Perangkat Daerah .....	49
Tabel 3.22 Perbandingan Nilai AKIP 2016-2019 .....	51
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah .....	52
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .....	54
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pengendalian Pembangunan Daerah yang Transparan dan Akuntabel .....	55
Tabel 3.26 Realisasi Penyerapan Anggaran Bagian Pembangunan Setda TA 2020 .....	56
Tabel 3.27 Lelang Pekerjaan yang Gagal Lelang.....	57

Tabel 3. 28 Permasalahan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa .....	59
Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Pemanfaatan Melalui Media yang Optimal .....	60
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Tertib Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa .....	63

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Dividen yang Disetorkan BUMD.....	30
Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja atas Target Tahun 2016-2020 .....	33
Grafik 3.3 Realisasi Penyaluran KUR, UMi dan Super Mikro di Kab. Kebumen (milyar) .....	34
Tabel 3.4 Rincian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro dan Kredit Super Mikro per Sektor di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020.....	35
Grafik 3.5 Nilai EKPPD 2015-2018.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara organisatoris kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

b. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
5. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, dan protokol;
6. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;
7. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, bidang administrasi, koordinasi, tata laksana serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten

Kebumen tidak lepas dari aspek dan isu strategis yang sampai saat ini masih harus dihadapi yaitu:

1. Belum rasionalnya struktur organisasi Setda dibandingkan dengan jumlah pegawai. Yaitu secara kelembagaan dan SDM-nya secara kuantitas masih kurang dibanding dengan beban kerja yang dilaksanakan;
2. Masih kurangnya pemahaman pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
3. Belum memadainya tingkat kesejahteraan pegawai.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya LKjIP Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah dalam rangka melaksanakan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2020, antara lain :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Sekretaris Daerah kepada Bupati dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Setda.

## **1.3. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pada tahun 2020 berdasarkan peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, adapun susunan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah yang dibantu :
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :



- a. Bagian Pemerintahan
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
- a. Bagian Perekonomian
  - b. Bagian Pembangunan
  - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4. Asisten Administrasi
- a. Bagian Umum
  - b. Bagian Organisasi
  - c. Bagian Hukum

#### 1.4. Sumber Daya Sekretariat Daerah

- a. Berdasarkan jabatan, jumlah PNS yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah PNS Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Staf Ahli Bupati	2
3.	Asisten Sekda	1
4.	Kepala Bagian	9
5.	Kasubbag	25
6.	Staf	122
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020

- b. Berdasarkan golongan, jumlah PNS yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	12
2.	III	102
3.	II	37
4.	I	9
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020

- c. Berdasarkan pendidikan, jumlah PNS yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah PNS menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	23
2.	S-1	63
3.	D-3	6
4.	D-2	0
5.	SMA	53
6.	SMP	4
7.	SD	11
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020

Dengan struktur organisasi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berupaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan melalui LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini mampu memberikan gambaran dan informasi yang transparan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020.

### 1.5. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka sistematika penyusunan LKjIP Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

SAMPUL DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. Aspek Perencanaan

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Aspek Perencanaan**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis yang disusun Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mendasari pada visi, misi Bupati yang kemudian dituangkan dalam tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

1. Visi

Visi Kabupaten Kebumen adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

2. Misi

Misi Kabupaten Kebumen ada 6 (enam) yaitu :

- a. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.
- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui

proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- f. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and clean government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kebumen periode Tahun 2016-2021 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sesuai dengan fungsi strategisnya menjabarkan Misi Bupati yang ke 1, ke 2, ke 3 dan ke 6. Sekretariat Daerah berperan sebagai advisor yang mengandung arti memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom. Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang akuntabel dimaksudkan sebagai upaya perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Berpijak pada rumusan Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, maka penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Mewujudkan kebijakan, koordinasi dan sinergitas di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dengan sasaran :

- a. Meningkatnya efektivitas koordinasi bidang sosial, agama, pendidikan dan olah raga; dan
- b. Meningkatnya prestasi olah raga dan pembinaan kepemudaan.

Tujuan 2 :

Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia.

Tujuan 3 :

Mewujudkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dengan sasaran :

- a. Tersedianya rencana investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD;
- b. Meningkatnya kinerja BUMD;
- c. Meningkatnya kinerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
- d. Lancarnya distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi; dan
- e. Tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari raya Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru.

Tujuan 4 :

Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum kabupaten dan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan serta budaya hukum masyarakat.

Tujuan 5 :

Mengoptimalkan kualitas pelayanan tugas umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan melalui pemberian dukungan rumah tangga, perlengkapan kesekretariatan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- b. Meningkatkan tertib administrasi umum di lingkungan Setda; dan
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang.

Tujuan 6 :

Mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur;
- b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur;
- d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Tujuan 7 :

Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

Tujuan 8 :

Mewujudkan publikasi dan kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dengan sasaran :

Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal.

Tujuan 9 :

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerja sama, dengan sasaran :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta tertib pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala desa.

## 2.2. Rencana Kinerja

Dalam rencana kinerja ini diuraikan terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun yang bersangkutan disertai dengan indikator keberhasilannya. Rencana kinerja Sekretariat Daerah secara garis besar di tahun 2016-2021 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, di mana penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang :

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- b. Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya;
- c. Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahun 2020 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2020 ini.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya prestasi olah raga dan pembinaan kepemudaan	1 Prosentase Capaian prestasi pemuda dan olahraga	58,65%



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
2	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	2 Cakupan penemuan kasus baru HIV	90%
		3 Cakupan penanganan kasus pertikaian antar agama	100%
		4 Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	85%
		5 Persentase ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	875 Ponpes/TPQ
		6 Persentase gereja dalam kondisi baik	100%
		7 Persentase wihara dalam kondisi baik	100%
		8 Tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji	0%
3	Meningkatnya kinerja BUMD	9 Prosentase BUMD berpredikat sehat	80%
4	Meningkatnya kinerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	10 Jumlah lembaga keuangan, koperasi, dan usaha kecil menengah yang terfasilitasi	50 UMKM
		11 Jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	30 UMKM
5	Terkoordinasinya distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi	12 Prosentase wilayah distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi	72%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum kabupaten dan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan serta budaya hukum masyarakat	13 Meningkatnya budaya hukum di lapisan masyarakat	80%
		14 Penyelesaian sengketa hukum	100%
		15 Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah	100%
		16 Meningkatnya kemudahan akses informasi hukum	80%
7	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	17 Prosentase penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%
		18 Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%
8	Meningkatkan kualitas, pengelolaan barang	19 Tersedianya sarpras penunjang pelaksanaan tupoksi	100%
		20 Persentase aset/bidang tanah pemda yang tersertifikat	18%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	21 Prosentase Perangkat Daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		22 Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi	B
		23 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen	B
10	Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah	24 Prosentase perangkat daerah yang telah mengembangkan budaya kerja	50% (25 PD)
11	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	25 UPP yang dievaluasi berpredikat baik	15%
		26 Rata-rata Nilai kepuasan masyarakat	80%
12	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel	27 Tingkat penyerapan/realisasi anggaran berjalan baik	94%
		28 Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	50%
		29 Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan	100%
13	Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan melalui media yang optimal	30 Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas	- Kali
		31 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100%
		32 Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi	24 Kali
		33 Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara- acara dinas Pemda	100 %
14	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta tertib pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa	34 Prosentase pelaksanaan sukses pemilu	100%
		35 Nilai EKPPD	>3
		36 Administrasi Pemerintahan dan pelayanan kecamatan baik	Baik

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2020 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020 ditunjukkan dalam 15 (lima belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator sasaran yang ingin dicapai menunjukkan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 115% yang disumbangkan oleh 13 (tiga belas) indikator sasaran kategori **Baik Sekali**, 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kategori **Baik**, 1 (satu) indikator kinerja masuk kategori **Cukup** dan 1 (satu) indikator berpindah kewenangan ke Dinas Kominfo. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan masing-masing indikatornya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya prestasi olah raga dan pembinaan kepemudaan	1 Prosentase Capaian prestasi pemuda dan olahraga	58,65%	55%	93%
2	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	2 Cakupan penemuan kasus baru HIV	90%	75,7%	84%
		3 Cakupan penanganan kasus pertikaian antar agama	100%	100%	100%
		4 Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	85%	85%	100%
		5 Persentase ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	875 Ponpes/ TPQ	915 Ponpes/ TPQ	104%
		6 Persentase gereja dalam kondisi baik	100%	100%	100%
		7 Persentase wihara dalam kondisi baik	100%	100%	100%
		8 Tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji	0%	0%	-
3	Meningkatnya kinerja BUMD	9 Prosentase BUMD berpredikat sehat	80%	100%	125%
4	Meningkatnya kinerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	10 Jumlah lembaga keuangan, koperasi, dan usaha kecil menengah yang terfasilitasi	50 UMKM	50 UMKM	100%
		11 Jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	30 UMKM	30 UMKM	100%
5	Terkoordinasinya distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi	12 Prosentase wilayah distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi	72%	80%	111%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum kabupaten dan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan serta budaya hukum masyarakat	13 Meningkatnya budaya hukum di lapisan masyarakat	80%	80%	100%
		14 Penyelesaian sengketa hukum	100%	100%	100%
		15 Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
		16 Meningkatnya kemudahan akses informasi hukum	80%	100%	125%
7	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	17 Prosentase penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%	100%
		18 Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%	100%
8	Meningkatkan kualitas, pengelolaan barang	19 Tersedianya sarpras penunjang pelaksanaan tupoksi	100%	100%	100%
		20 Persentase aset/bidang tanah pemda yang tersertifikat	18%	29,7%	165%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	21 Prosentase Perangkat Daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%	100%
		22 Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi	B	B*	100%
		23 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen	B	B*	100%
10	Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah	24 Prosentase perangkat daerah yang telah mengembangkan budaya kerja	50% (25 PD)	56% (29 PD)	112%
11	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	25 UPP yang dievaluasi berpredikat baik	15%	69,23%	461,5%
		26 Rata-rata Nilai kepuasan masyarakat	80%	81,97%	102,46%
12	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel	27 Tingkat penyerapan/realisasi anggaran berjalan baik	94%	91,90%	97,76%
		28 Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	50%	94,38%	188,76%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
		29 Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan	100%	100%	100%
13	Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan melalui media yang optimal	30 Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas	- Kali	0	0
		31 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%
		32 Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi	24 Kali	30 kali	100%
		33 Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara- acara dinas Pemda	100 %	100 %	100 %
14	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta tertib pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa	34 Prosentase pelaksanaan sukses pemilu	100%	100%	100%
		35 Nilai EKPPD	>3	3,3198*	110%
		36 Administrasi Pemerintahan dan pelayanan kecamatan baik	Baik	Baik	100%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.



Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercermin dari capaian kinerja beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

**Sasaran 1 : “ Meningkatkan prestasi olah raga dan pembinaan kepemudaan”**

Sasaran Meningkatkan prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran, rata-rata capaian indikator sasaran ini mencapai 100% selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Kepemudaan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target akhir 2021	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Prosentase capaian prestasi pemuda dan olah raga	99,08%	58,65%	55%	93%	65,38%	82,59%
Rata-rata					93%		

Sumber : Bagian Kesra Setda Kebumen, 2020.

Sasaran meningkatnya Prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase capaian prestasi pemuda dan olahraga dengan capaian indikator 93% atau kategori **Baik** dari target yang ditentukan sebesar 58,65% dengan realisasi 55%. Indikator kinerja ini didukung oleh 4 kegiatan antara lain Lomba Olahraga antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Fasilitasi Penerimaan, Pelepasan dan Pemantauan Kuliah Kerja Nyata, Peningkatan Hubungan Silaturahmi Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dan Terfasilitasi Lomba Pembinaan dan Sosialisasi Unit Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kebumen. Melalui kegiatan tersebut, langkah-

langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sasaran ini antara lain :

1. Lomba olahraga antar perangkat daerah menjadi salah satu pendukung indikator kinerja ini untuk tahun tahun sebelumnya dengan jumlah partisipasi peserta yang mengikuti lomba sebanyak 75% atau sejumlah 40 Perangkat Daerah. Untuk tahun 2020 kegiatan ini tidak bisa diadakan karena sudah dirasionalisasi terkait dengan adanya wabah Covid-19. Sehingga pada lomba aparatur sipil negara antar perangkat daerah tidak bisa terfasilitasi dan tidak terealisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapan kedepan jika wabah corona berakhir selain lomba antar OPD, guna meningkatkan capaian indikator kinerja, juga lebih mengintensifkan pemantauan dan monitoring pelaksanaan olahraga pada semua Perangkat Daerah dan Kecamatan dan melaksanakan berbagai rapat koordinasi bidang olahraga dengan stakeholder olahraga di Kabupaten Kebumen.
2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah pedesaan, yang didukung dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang masuk pada pemerintah Kabupaten Kebumen. Jumlah Universitas yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di kabupaten kebumen untuk tahun 2020 berkurang dari tahun lalu sebanyak 16 universitas dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4.241 orang ditempatkan di 244 desa, sekarang hanya 6 universitas karena dalam masa wabah penyebaran covid sehingga dibatasi. Adapun jumlah yang mendaftar KKN juga sebanyak 6 universitas dengan total mahasiswa sebanyak 616 orang, dibandingkan dengan tahun lalu jauh berkurang sekitar 3.625 orang, yang selanjutnya ditempatkan pada 109 desa di Kabupaten Kebumen. Adapun Universitas yang melaksanakan KKN di Kabupaten Kebumen antara lain :
  - a. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 320 mahasiswa
  - b. Universitas Gajah Mada Yogyakarta 46 mahasiswa
  - c. Universitas Islam Negeri Yogyakarta 6 mahasiswa
  - d. Universitas Diponegoro Semarang 48 mahasiswa
  - e. Institut Pertanian Bogor 26 mahasiswa
  
  - f. UMNU Kebumen 170 mahasiswa

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, secara umum program KKN yang dijalankan oleh mahasiswa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan yang diharapkan mampu berperan serta didalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Karena dalam masa pandemi covid – 19 ada juga beberapa kegiatan KKN tertentu yang dilakukan secara online/ daring.

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan memfasilitasi UKS yang ada di kecamatan melalui proses peningkatan kemampuan Tim Pembina UKS Kecamatan. Hal –hal yang telah dilakukan antara lain :
  - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan ke TP UKS Kecamatan se-Kabupaten Kebumen;
  - b. mengadakan sosialisasi dan pembinaan TP UKS Kecamatan se Kabupaten Kebumen dengan menghadirkan narasumber yang berkopentent untuk menyamakan langkah dalam menjalankan TP UKS Kecamatan;
  - c. mengadakan rapat koordinasi dengan TP UKS sebanyak 3 kali dalam 1 tahun untuk menginventarisir permasalahan dan melakukan evaluasi kegiatan di TP UKS Kecamatan
  - d. sebagai upaya pembinaan untuk menghasilkan sekolah-sekolah yang memenuhi standar penanganan kesehatan yang baik, maka dilakukan lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten dan Karesidenan.

Dari program Upaya Kesehatan Masyarakat, untuk Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengikuti lomba sekolah sehat baik tingkat kabupaten maupun tingkat se karesidenan Kedu ataupun tingkat provinsi untuk semua kategori.

Manfaat Evaluasi TP UKS adalah mengetahui sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan

Sedangkan Program TP UKS/M Tahun 2020 pada Pemerintah daerah terutama Bagian Kesra adalah sama dengan tahun – tahun sebelumnya.

Adapun programnya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi/pembinaan TP UKS Kabupaten & Kecamatan
2. Fasilitasi Lomba UKS TK. Provinsi
3. Evaluasi TP UKS Kabupaten & Kecamatan

Kegiatan dari program tersebut di atas adalah :

- a. Karena dalam masa pandemi covid 19 maka banyak program program UKS yang tidak bisa dilaksanakan sehingga selama tahun 2019 hanya bisa melakukan pembinaan UKS sebanyak 10 kali
- b. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Maret 2020 diikuti diikuti oleh perwakilan TP UKS/M Kecamatan sejumlah 52 orang dan seluruh Tim Pembina UKS/M Kabupaten Kebumen
- c. Karena masa Pandemi juga maka tahun ini tidak ada Lomba LSS untuk jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS baik Tingkat Kabupaten, tingkat propinsi maupun nasional.
- d. Monitoring TP UKS/M dan Evaluasi TP UKS/M Kabupaten dan Kecamatan tidak bisa dilaksanakan karena pandemi covid sehingga anggaran dikembalikan ke kas negara.

Adapun Alokasi anggaran untuk mencapai indikator sasaran “Meningkatnya prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan” yang bersumber dari APBD sejumlah Rp. 232.167.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi Rp. 68.136.000 dengan realisasi Rp. 65.841.802,00 atau 97%.

### **Sasaran 2 : “Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia”**

Sasaran Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia didukung oleh 7 (tujuh) indikator sasaran, rata-rata capaian indikator sasaran ini mencapai 84 % selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Terwujudnya Masyarakat yang Agamis dan Berakhlak Mulia

No	Indikator sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target akhir 2021	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Cakupan penemuan kasus baru HIV	75,7%	90%	75,7 %	84%	95%	84,21%
2	Cakupan penanganan kasus pertikaian antar agama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	85%	85%	85%	100%	90%	83,33%
4	Prosentase ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	98% 900 Ponpes/ TPQ	875 Ponpes / TPQ	915 Ponpes/ TPQ	104%	925	82,27%
5	Persentase gereja dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	90%
6	Persentase wihara dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	95%
7	Tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji	70 %	70 %	0 % NA	0% NA	70%	100%
Rata-rata					84%		

Sumber : Bagian Kesra Setda Kebumen, 2020

1. Indikator sasaran cakupan penemuan kasus baru HIV capaian kinerjanya 84 % atau kategori capaian kinerja **Baik** dengan target 90% dan teralisasi 75,7%. Kasus HIV yang ditemukan pada tahun 2020 sejumlah 184, jumlahnya sama dengan penemuan kasus HIV tahun 2019, jadi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya penemuan kasus baru HIV, tidak ada penurunan ataupun kenaikan kasus baru HIV. Tapi setidaknya tidak ada penambahan kasus baru HIV lagi untuk 2 tahun ini ( 2019 sd 2020 ), jika dibandingkan tahun 2th yg lalu yaitu 2018 kasus baru HIV masih sangat tinggi sejumlah 219, tahun 2017 kasus baru HIV sejumlah 267 kasus sehingga perkembangan HIV di Kebumen pertahun selalu menurun walaupun untuk tingkat propinsi masih menduduki rangking ke 2. Untuk perkembangan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami

penurunan sebesar 1,98%. Guna mengurangi kasus HIV baru, upaya yang dapat dilaksanakan masih bersifat preventif melalui :

- a. BinteK pemulasaran jenazah ODHA untuk tokoh masyarakat dan Kasi Kesos
- b. Sosialisasi HIV-AIDS ditingkat sekolah dan Organisasi Masyarakat
- c. Sosialisasi HIV-AIDS dilingkungan kerja (Perusahaan)
- d. Bantuan Nutrisi bagi ODHA (orang dengan HIV-AIDS)
- e. Penambahan layanan test HIV (Klinik VCT)

Dengan adanya beberapa kegiatan tersebut diatas diharapkan akan sangat mendukung dan berpengaruh terhadap penurunan/ pengurangan kasus HIV di Kabupaten Kebumen karena masyarakat sudah lebih sadar dan tahu akan bahayanya HIV/AIDS, walaupun untuk tingkat propinsi masih menyumbang lebih besar dibanding kabupaten lainnya karena Kebumen masih menduduki rangking 2 di Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan hambatan yang dialami yaitu :

- a. Belum semua anggota KPA Kabupaten Kebumen aktif dalam Penanggulangan HIV-AIDS
- b. Adanya perubahan perilaku di masyarakat dan remaja kearah perilaku yang beresiko tertular HIV-AIDS.
- c. Populasi kunci masih berperilaku beresiko tertular HIV-AIDS
- d. Sulitnya merubah perilaku menyimpang pada ODHA dan banyaknya ODHA yang mangkir pengobatan.
- e. Belum seluruh masyarakat paham tentang HIV-AIDS secara komprehensif.
- f. Kesadaran masyarakat untuk test HIV masih rendah.

Solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di akan datang:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
- b. Peningkatan kapasitas tenaga medis dalam pelayanan kepada ODHA
- c. Organisasi perangkat Daerah anggota KPA untuk dapat berperan aktif sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan HIV-AIDS.
- d. Menjamin keberlangsungan program dengan dukungan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota.

- e. Menegakan Peraturan daerah dalam Penanggulangan HIV-AIDS
2. Indikator sasaran Cakupan penanganan kasus pertikaian antar agama. Target Indikator sasaran ini 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100% atau dalam kategori capaian kinerja **Baik**. Untuk tahun 2020 data kasus pertikaian agama yang masuk pada bagian kesra tidak ada, sma dengan tahun 2019 tidak ada kasus pertikaian antr umat beragama. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahwa kasus pertikaian antar agama di kabupaten kebumen mulai tahun 2015 s.d 2017 belum pernah menemukan kasus dimaksud. Pada tahun 2018 ada 1 ( satu ) kasus pertikaian agama yang dapat terselesaikan sesuai dengan peraturan dan norma-norma kegamaan yang berlaku.
3. Indikator sasaran Persentase Masjid dan Mushola dalam kondisi baik  
Indikator sasaran ini ditargetkan 80% masjid dan mushola dalam kondisi baik dalam realisasinya hanya tercapai 85% sehingga capaian kinerjanya 104 % atau kategori capaian kinerja **Baik**. Indikator ini tercapai bahkan melebihi target dikarenakan besarnya antusias dan banyaknya proposal yang masuk dapat dicairkan. Disamping proposal yang masuk juga ada masjid kriteria tertentu yang mendapatkan hibah yaitu Masjid Agung Kebumen dan juga masjid yang berada dipinggir jalan utama. Untuk masjid yang berada dipinggir jalan utama belum bis terwujud karena masih ada beberapa kendala dalam menentukan spesifikasi kriteria masjid.
4. Indikator sasaran Persentase Ponpes dan TPQ dalam kondisi baik. Indikator sasaran ini untuk tahun 2020 ditargetkan 875 Ponpes dan dalam kondisi baik dengan realisasi 915 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104% atau kategori capaian kinerja **Baik**. Sedangkan TPQ yang harusnya mendapatkan sesuai SK adalah 449 TPQ. Tapi yang mencairkan sebanyak 446 yang tidak mencairkan 3, dengan alasan tidak ada lembaga TPQ didesa tersebut yaitu desa Jagasima, Petanahan dan Kambang Sari, Alian, sedangkan 1 TPQ tidak membuat SPJ Tahun sebelumnya (2019) yaitu desa Tanuharjo, Alian. Untuk tahun 2019 yang mencairkan 441 dan yang 8 tidak mencairkan. Adapun anggaran untuk TPQ sejumlah 2.245.000.000,00 dengan masing masing TPQ mendapatkan Rp. 5.000.000,00. Adapun hambatan untuk indikator ini rata rata sama dengan indikator lainnya yaitu :

- a. Anggaran yang terbatas
  - b. Pengurus TPQ dan Ponpes banyak yang belum berniat untuk merenovasi tempat ibadahnya.
  - c. Kekurangpahaman para penerima Bantuan Keuangan terkait administrasi peng SPJ an.
5. Indikator sasaran Persentase Gereja dalam kondisi baik
- Indikator sasaran ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% sehingga masuk kategori caaian kinerja **Baik**. Jumlah Gereja yang sudah dilaksanakan pembenahan gerejanya sebanyak 2 Gereja dimana masing masing gereja mendapatkan bantuan Rp. 25.000.000,00. Kendala yang dihadapi untuk indikator sasaran ini sebagai berikut :
- a. Proposal yang masuk khusus untuk gereja sangat sedikit dan terbatas
  - b. Belum pahamnya prosedur pengajuan proposal permohonan bantuan hibah tempat ibadah walaupun sudah diadakan sosialisasi untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen.
  - c. Pengurus gereja belum berniat untuk merenovasi gereja.
6. Indikator sasaran Persentase Wihara dalam kondisi baik.
- Indikator sasaran ini target 100% dengan realisasinya 100% atau capaian kinerja 100% masuk pada kategori capaian kinerja **Baik**. hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya wihara di Kabupaten Kebumen tidak ada yang mengajukan bantuan, Pengurus wihara belum berniat untuk merenovasi wihara karena masih dalam kondisi baik dan jumlah wihara yang di Kabupaten Kebumen tidak begitu banyak. Salah satu upaya untuk mencapai indikator sasaran dimaksud antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang beragama hindu.
7. Indikator kinerja tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji.
- Target indikator sasaran ini adalah 70% dengan realisasi 0%(NA) sehingga capaian kinerjanya 0%(NA) atau capaian kinerja **Kurang**. Hal tersebut dikarenakan untuk tahun 2020 tidak ada pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang disebabkan masa pandemi covid 19 yang melanda dunia. Hal yang mendukung tercapainya sasaran adalah melalui program fasilitasi penyelenggaraan haji daerah dengan kegiatan pendampingan bagi jamaah



haji, fasilitasi pemberangkatan, pelaksanaan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Kebumen. Keberhasilan tersebut adalah hasil dari peningkatan kualitas pelayanan petugas, akomodasi, jadwal keberangkatan dan jadwal penjemputan terhadap jamaah. Apabila di dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, indikator capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 89,15% dari tahun 2018 dimana capaian kinerja tahun 2017 sebesar 93,38%, dan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 95%. Adapun untuk mencapai indikator ini menggunakan Alokasi anggaran APBD murni adalah Rp. 1.857.608.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi Rp. 563.971.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.015.350,00 atau 5,85 %.

**Sasaran 3 : “Meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”**

Didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut yaitu:

Tabel 3.4. Realisasi Persentase BUMD Berpredikat Sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	R.Th 2019	Tahun 2020			T.Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
				Target	Real	% Capaian		
1	Persentase BUMD berpredikat sehat	%	85,7	80	100	125	100	100
Persentase Capaian Sasaran Strategis						100%	Sangat Baik	

Berdasarkan Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (satu) sebesar 100 % atau dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Persentase BUMD Berpredikat Sehat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Target	%	80	80	80	80	80	-
2.	Realisasi	%	80	80	80	85,7	100	-
3.	Target Akhir Renstra	%						100

Bahwa pada tahun 2020 terdapat perubahan bentuk badan hukum 3 (tiga) BUMD sebagai amanat dari Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 331 ayat (3), bahwa BUMD terdiri atas

perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah, 3 (tiga) BUMD tersebut yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
2. Perusahaan Daerah (PD) Apotek Luk Ulo menjadi PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.
3. Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Kebumen menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.

Dari 3 (tiga) BUMD diatas ada 2 (dua) BUMD yang masih menggunakan nama lama karena masih dalam proses perijinan perubahan bentuk badan hukum yaitu PD Apotek Luk Ulo dan PD BPR Bank Kebumen.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (satu) pada tabel 3.4 yaitu : Perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut diperoleh dari rasio perbandingan antara jumlah BUMD dengan kategori sehat dengan jumlah seluruh BUMD. Pemerintah kabupaten Kebumen memiliki 7 (tujuh) BUMD yaitu :

Tabel 3.6 Daftar BUMD Kabupaten Kebumen

No	NAMA BUMD	JENIS USAHA
1	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Air Minum
2	PD BPR Bank Kebumen	Perbankan
3	PD Apotek Luk Ulo	Farmasi
4	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Perbankan
5	PT BKK Jateng (Perseroda)	Perbankan
6	PT BPD Jateng	Perbankan
7	PT PRPP	Promosi/Pariwisata

Dari 7 (tujuh) BUMD diatas, ada 4 (empat) BUMD yang kepemilikannya *sharing* dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu PT BKK Jateng (Perseroda) dengan kepemilikan saham Pemkab Kebumen sebesar 0,73%, PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) dengan kepemilikan saham Pemkab Kebumen sebesar 50,65%, PT BPD Jawa Tengah dengan kepemilikan saham Pemkab Kebumen sebesar 1,21% dan PT PRPP dengan kepemilikan saham Pemkab Kebumen sebesar 0,30%, kepemilikan saham Pemkab Kebumen pada PT BPD Jateng hanya minoritas, namun jumlah setoran deviden PT BPD Jateng kepada Pemkab Kebumen cukup signifikan, selanjutnya untuk 3 (tiga) BUMD lain yaitu PD Apotek Luk Ulo, PD BPR Bank Kebumen, dan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dari 7 BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2020 semuanya telah masuk dalam Kategori **SEHAT** yaitu Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, PT BPR BKK Kebumen, PD BPR Bank Kebumen, PD Apotek Luk Ulo, PT BPD Jateng, PT PRPP dan PT BKK Jateng, sehingga bila dihitung secara prosentase capaian Indikator Kinerja BUMD berpredikat sehat di tahun 2020 telah mencapai 100% bahkan melebihi target yang ditetapkan di tahun 2020.

Untuk aspek penilaian BUMD bidang jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDAM oleh BPKP, apotek dan PT. PRPP oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Adapun hasil penilaian OJK untuk BUMD dibidang jasa keuangan adalah 3 (tiga) BUMD dinilai **SEHAT** yaitu PT BPR BKK Kebumen, PD BPR Bank Kebumen dan PT BKK Jateng. Kemudian untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa hasil penilaian BPKP adalah “sehat” dan untuk PD Apotek Luk Ulo dan PT. PRPP mendapatkan opini WTP oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Selain dengan kriteria penilaian tersebut diatas, hasil kinerja BUMD dilihat juga dari jumlah deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan juga pertumbuhan asset BUMD.

Tabel 3.7 Deviden yang Disetorkan BUMD (*Audited*)

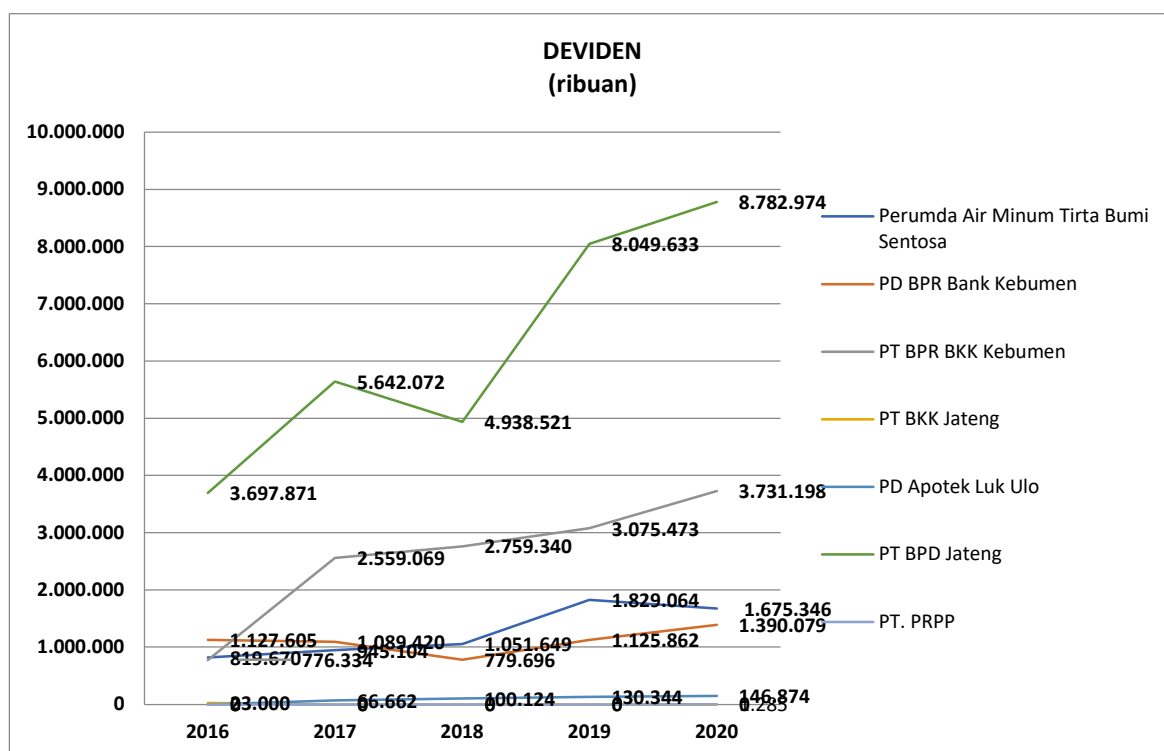
(dalam ribuan)

BUMD	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	819.670	945.104	1.051.649	1.829.064	1.675.346
PD BPR Bank Kebumen	1.127.605	1.089.420	779.696	1.125.862	1.390.079
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	776.334	2.559.069	2.759.340	3.075.473	3.731.198
PD Apotek Luk Ulo	-	66.662	100.124	130.344	146.874
PT. BKK Jateng	23.000	-	-	-	-
PT BPD Jateng	3.697.871	5.642.072	4.938.521	8.049.633	8.782.974
PT PRPP	-	-	-	-	1.285
<b>Total</b>	<b>6.444.480</b>	<b>10.302.327</b>	<b>9.629.330</b>	<b>14.210.376</b>	<b>15.727.756</b>

Keterangan :

Tahun 2019 data PD BKK Sruweng yang sudah konsolidasi menjadi PT BKK Jateng (Sejak tanggal 2 Juli 2019 PD. BKK seluruh Jawa Tengah melakukan konsolidasi (merger) menjadi PT. BKK Jawa Tengah Perseroda)

Grafik 3.1 Dividen yang Disetorkan BUMD



Tabel 3.8 Pertumbuhan Aset BUMD (Audited)

BUMD	Tahun 2016 (juta)	Tahun 2017 (juta)	Tahun 2018 (juta)	Tahun 2019 (juta)
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	37.523	40.930	45.419	49.547
PD BPR Bank Kebumen	99.832	101.408	111.369	118.351
PT BPR BKK Kebumen	390.266	411.236	451.057	493.968
PT BKK Jateng	18.078	20.779	19.744	2.358.450
PD Apotek Luk Ulo	1.649	1.964	2.301	2.697
PT BPD Jateng	51.246.000	61.466.000	66.846.000	71.828.229
PT PRPP	47.705	50.151	51.740	52.366
<b>Total Aset BUMD</b>	<b>51.841.053</b>	<b>62.092.468</b>	<b>67.527.630</b>	<b>70.261.125</b>

Keterangan :

Tahun 2019 data PD BKK Sruweng yang sudah konsolidasi menjadi PT BKK Jateng (Sejak tanggal 2 Juli 2019 PD. BKK seluruh Jawa Tengah melakukan konsolidasi (merger) menjadi PT. BKK Jawa Tengah Perseroda)

Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan sasaran 1 (satu) "BUMD berpredikat sehat" ditengah Pandemi COVID-19 sehingga dapat tercapai melebihi target sebesar 125% antara lain :

- a. Dimulai dengan pembahasan rencana bisnis setiap BUMD pada akhir tahun antara Bagian Perekonomian dengan direktur, dewan pengawas serta Tim Pembina BUMD yang hasilnya kemudian ditetapkan dengan SK Bupati Kebumen.
- b. Evaluasi rutin terhadap BUMD setiap triwulan oleh Bagian Perekonomian dan Tim Pembina BUMD
- c. Selalu melakukan koordinasi antara Bagian Perekonomian dengan pengurus BUMD (direksi dan dewan pengawas)
- d. Bagian Perekonomian secara rutin melakukan kegiatan monitoring ke cabang-cabang BUMD
- e. Adanya komitmen pemkab Kebumen untuk penyertaan modal kepada BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyertaan modal kepada BUMD kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2025.

Dalam mencapai sasaran strategis 1 (satu) diatas didukung melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatannya Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah, alokasi anggaran di Tahun 2020 untuk menunjang Program/Kegiatan tersebut diatas

adalah sebesar Rp. 183.120.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 179.406.712,- atau sekitar 97,97% dari alokasi.

**Sasaran 4 : “Meningkatnya kinerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM”**

Sasaran Meningkatkan kinerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM didukung oleh 4 (empat) indikator sasaran, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

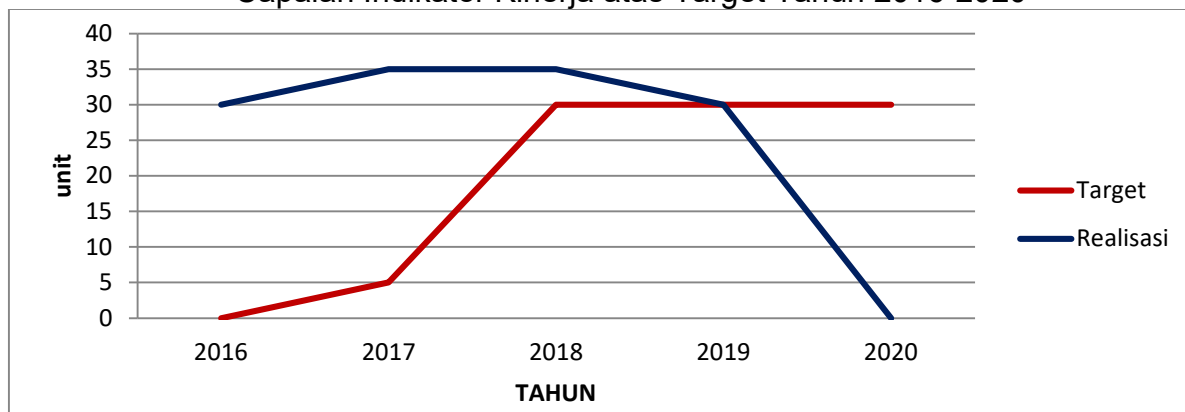
No	IndikatorKinerja	Satuan	R.Th 2019	Tahun 2020			T.Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
				Target	Real	% Capaian		
1	Jumlah lembaga keuangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah yang terfasilitasi mengikuti Bintek Perijinan LKM dan sosialisasi program pemerintah (KUR dan Kredit Ultra Mikro)	Unit	50	50	50	100	200	150
2	Meningkatnya jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	Jumlah	35	30	30	100	130	123
Persentase Capaian Sasaran Strategis						100	Sangat Baik	

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kebumen, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.10 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 sebesar 100% atau dengan kategori **Baik**.

Grafik 3.2

Capaian Indikator Kinerja atas Target Tahun 2016-2020



Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (dua) pada tabel 3.10 yaitu:

1. Indikator Kinerja Pertama yaitu jumlah lembaga keuangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah yang terfasilitasi mengikuti Bintek Perijinan LKM dan sosialisasi program pemerintah (KUR dan Kredit Ultra Mikro) telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tahun 2018 dilaksanakan pendampingan bintek perijinan LKM dengan sasaran 20 Gapoktan penerima Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dan Badan Kredit Desa (BKD) yang mempunyai ijin operasional dari Menteri Keuangan sesuai UU Nomor 7 tahun 1992, yang karena ketentuan UU No. 1 Tahun 2013 harus berbadan hukum.
- b. Dari hasil fasilitasi bintek perijinan LKM, sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Kebumen telah terdapat ijin LKM sebagai berikut :
  - 1) PT. LKM BKD Kebumen
  - 2) PT. LKM BKD Gombang
  - 3) Koperasi LKM Gapoktan Demang tani Desa Demangsari Ayah
  - 4) Koperasi LKM agrobisnis Tani Makmur Blater Desa Blater Kecamatan Poncowarno
  - 5) Koperasi LKM Gapoktan Sekar Harum Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam
  - 6) Koperasi LKM agrobisnis Karya Makmur Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno
  - 7) Koperasi LKM Agrobisnis Rukun Makmur Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren

8) Koperasi LKM Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah

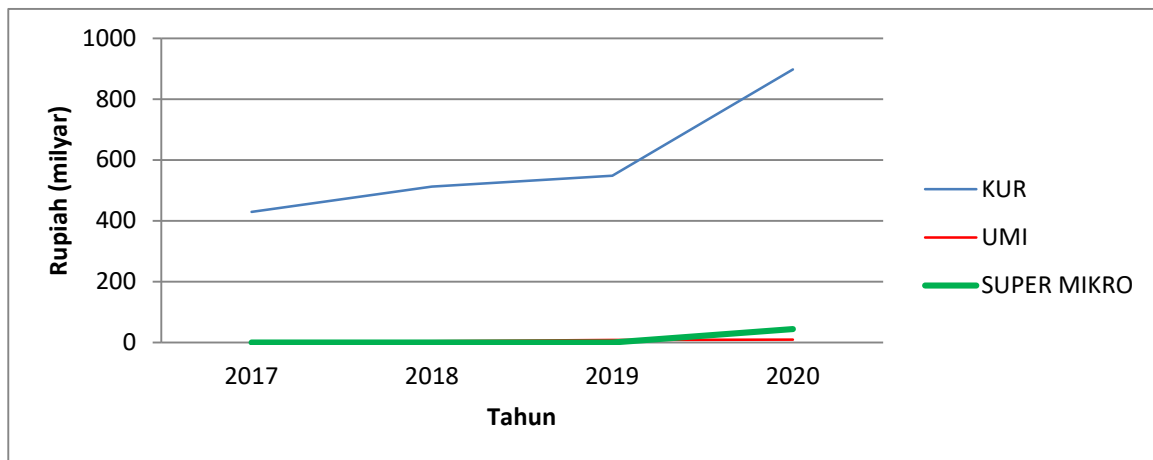
c. Sosialisasi Program Pemerintah yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) telah dilaksanakan terhadap 50 UMKM sesuai target Renstra di tahun 2020. Berikut kami sampaikan perkembangan realisasi Kredit KUR dan Kredit UMi tahun 2019 dan 2020. Berikut kami sampaikan progres penyaluran KUR dan UMi dari tahun ke tahun :

Tabel 3.10 Progres Penyaluran KUR, UMi dan Super Mikro di Kab. Kebumen

No	Program Pembiayaan	Nasabah				Nominal (milyar)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	KUR	21.230	22.414	22.176	29.874	429,2	512,7	547,5	898,1
2.	Umi	949	941	2.739	2.886	2,9	3,3	8,3	9,7
3.	Super Mikro				5.100				44,13

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kebumen, 2020.

Grafik 3.3 Realisasi Penyaluran KUR, UMi dan Super Mikro di Kab. Kebumen (milyar)



Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kebumen, 2020.

Secara rinci Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro dan Kredit Super Mikro per sektor di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rincian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro dan Kredit Super Mikro per Sektor di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020



No.	Sektor	Nasabah	Nominal (juta)
1.	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	5.024	122.578,1
2.	Perikanan	291	8.775,7
3.	Industri Pengolahan	6.908	189.296,9
4.	Konstruksi	28	902
5.	Perdagangan Besar dan Eceran	16.899	481.474,8
6.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	871	25.823
7.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	215	10.370
8.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	186	5.548,7
9.	Jasa Pendidikan	39	417,8
10.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51	3.172
11.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan lainnya	2.247	59.480,5
12.	Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>32.760</b>	<b>907.854,6</b>

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kebumen, 2020.

Sehingga target akhir renstra pelaksanaan sosialisasi baik perijinan LKM dan program pemerintah (KUR dan UMI) s/d akhir tahun 2021 sejumlah 200 dapat tercapai bahkan melebihi target, dengan capaian indikator kinerja s/d tahun 2020 sebesar 300 atau 150% atas target akhir renstra.

2. Indikator Kinerja Kedua yaitu meningkatnya jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran.

Indikator Kinerja sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen, telah digeser dan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, hasil koordinasi antara Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilaporkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Dikarenakan adanya pandemic COVID-19, Pameran UMKM secara langsung ditiadakan dan diganti dengan pameran secara virtual. Yang diselenggarakan baik oleh Dekranas Pusat, Dekranas Jateng dan Pemprov Jateng. Selain itu anggaran pameran juga telah difocusing untuk penanganan COVID-19. Tahun 2020 Pemkab Kebumen bersama Kementrian Luar Negeri mengikuti Pameran Virtual yang melibatkan buyer dari beberapa Negara Asia Pasifik

yang diikuti UMKM yang memenuhi syarat dan mempunyai pasar di Asia Pasifik yaitu :

- a. UMKM makanan dan minuman ( kopi, gula semut, garam)
- b. UMKM Kriya (batik, pandan, jenitri dan songkok).

Untuk mencapai sasaran strategis 2 (dua) tersebut dilakukan melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Keegiatannya yaitu Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran 2 (dua) yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 100.121.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 99.246.200,- atau 99,13%.

**Sasaran 5 : "Terkoordinasinya distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi"**

Sasaran Terkoordinasinya distribusi BBMG dan pupuk bersubsidi didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Terkoordinasinya Distribusi BBMG dan Pupuk

No	Indikator Kinerja	R.Th 2019	Tahun 2020			T.Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
			Target	Real	% Capaian		
1	Prosentase wilayah distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi	74%	72%	80%	111%	80%	100

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kebumen, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 sebesar 111% atau dengan kategori **Sangat Baik**

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Prosentase Wilayah Distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Target	%	-	62	67	69	72	-
2.	Realisasi	%	60	62	68	70	80	-
3.	Target Akhir Rentra	%						80

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkoordinasinya distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi pada tabel 3.13 yaitu : Indikator kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu prosentase wilayah distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi dengan perhitungan Indikator Kinerja menggunakan Jumlah wilayah distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi dengan total wilayah distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi di Kab. Kebumen.

Dikatakan tertib administrasi dalam hal ini didasarkan pada yaitu untuk BBMG adalah sesuai HET dan pencatatan pada logbook sedangkan Pupuk bersubsidi adalah sesuai 6T (Tepat Kualitas, Jumlah, Waktu, Tempat, Harga, Administrasi).

Monitoring dilakukan dengan metode *Random Sampling* ke beberapa pangkalan dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) di wilayah distribusi masing-masing. Untuk BBMG dari jumlah pangkalan yang dimonitor, rata-rata sudah memahami kewajiban administrasi tersebut dan dapat menunjukkan administrasi walaupun administrasi belum tertata rapi.

Adapun HET ditingkat pangkalan sudah diketahui oleh pangkalan tersebut dan dipasang stiker disetiap pangkalan. Pangkalan diketahui menjual sesuai dengan HET apabila pangkalan tersebut membuat nota penjualan. Sedangkan untuk Pupuk Bersubsidi dari indikator penilaian Tepat Kualitas dan Jumlah tidak terdapat permasalahan dalam artian tidak terdapat pupuk palsu ataupun timbangan kurang dari tingkat Produsen hingga tingkat pengecer.

Untuk Tepat Tempat bahwa dalam distribusi pupuk bersubsidi sudah diatur lokasi desa yang akan dilayani oleh suatu kios pengecer, dan Tepat Waktu lebih merupakan komunikasi yang baik antara petani dengan pedagang pengecer

sehingga disaat petani membutuhkan pupuk bersubsidi maka stok di kios pengecer sudah tersedia.

Adapun Tepat Administrasi dan Harga, rata-rata pengecer sudah memahami kewajiban administrasi dan dapat menunjukkan administrasi walaupun administrasi kurang lengkap. HET ditingkat pengecer sudah diketahui dan dipasang stiker disetiap kios pengecer serta dibuatkan nota penjualan.

Dari sample sejumlah 50 terdiri dari 25 pangkalan dan 25 kios pupuk bersubsidi yang telah dilakukan monitoring, terdapat total 37 terdiri dari 25 pangkalan dan 15 kios yang telah tertib administrasi dengan persentase capaian sebesar 80% angka tersebut telah melebihi target yang telah direncanakan sehingga capaian indikator sasaran terhadap target tahun 2020 sebesar 111%.

Diharapkan agar Pangkalan dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang belum tertib administrasi dan belum sesuai HET dengan langkah yang telah dilakukan Bagian Perekonomian melalui pembinaan dan monitoring kepada Pangkalan dan Pengecer secara berkala, sehingga secara bertahap prosentase distribusi BBMG dan Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi dapat meningkat.

Untuk mencapai sasaran strategis 3 (tiga) tersebut dilakukan melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Keegiatannya yaitu Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran 3 (tiga) yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 109.438.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 107.300.900,-(98,05%).

Dari total 3 (tiga) Sasaran Strategis diatas yang didukung oleh 1 (satu) Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan 3 (tiga) Kegiatan dapat diakumulasikan alokasi anggaran untuk mencapai ke 3 (tiga) sasaran strategis tersebut yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 392.679.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 385.953.812,- (98,29%).

**Sasaran 6 : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum kabupaten dan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan serta budaya hukum masyarakat”**

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum kabupaten dan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan serta budaya hukum masyarakat didukung oleh 4 (empat) indikator sasaran, capaian indikator sasaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Kabupaten dan Desa Sesuai Dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan serta Budaya Hukum Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi Th 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
			Target	Real	% Capaian		
1	Meningkatnya budaya hukum di lapisan masyarakat	100%	80%	80%	100%	80%	125%
2	Penyelesaian sengketa hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terfasilitasinya penyusunan rancangan produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kemudahan akses informasi hukum	100%	80%	100%	125%	85%	117,65%

Sumber : Bagian Hukum Setda Kebumen, 2020.

Penjelasan masing-masing kinerja indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Indikator Meningkatnya budaya hukum di lapisan masyarakat dihitung dari jumlah wilayah sasaran yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah total wilayah sasaran penyuluhan dikali 100%. Wilayah yang menjadi sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.14 Wilayah Sasaran yang Dilakukan

NO	JENIS	JUMLAH WILAYAH SASARAN YANG DILAKUKAN	JUMLAH SELURUH WILAYAH SASARAN
1	Penyuluhan Hukum Desa	0 desa	0 desa
2	Penyuluhan Hukum Tipikor	10 kecamatan	10 kecamatan
3	Sosialisasi HAM	3 lokasi	3 lokasi

Sumber : Bagian Hukum Setda Kebumen, 2020.

Berdasarkan tabel diatas maka capaian indikator kinerja adalah 80 % atau dengan kategori baik. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat meliputi Penyuluhan Hukum Desa, Penyuluhan Hukum Tipikor dan Sosialisasi HAM. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat terlaksana 100%, untuk Tahun 2020 kegiatan Penyuluhan Hukum Desa tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19. Pandemi ini tidak memungkinkan pelaksanaan penyuluhan secara face to face sehingga tidak dilaksanakan. Sedangkan dua kegiatan penyuluhan lainnya dilakukan sebelum pandemi covid19 (triwulan pertama). Untuk kegiatan penyuluhan hukum Tipikor dilaksanakan di Kecamatan dengan peserta Kepala Desa dan ASN dengan narasumber Kejaksaan, Tim Saber Pungli dan Inspektorat. Sedangkan untuk Sosialisasi HAM tahun 2020 dengan tema Perlindungan Hak Perempuan dan Anak menghadirkan narasumber dari Dispermades dan P3A dengan materi Implementasi Penghormatan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen sebagai Wujud Penegakan HAM, RESKRIM POLRES Kebumen yang menyampaikan materi tentang Anak Berhadapan dengan Hukum serta narasumber yang terakhir Psikolog Klinis di RSUD dr. Soedirman Kebumen yang menyampaikan materi tentang Waspada Penyimpangan Perilaku dan Dampaknya. Sosialisasi HAM dilaksanakan di 3 Perguruan Tinggi di Kebumen. Penyuluhan Hukum Tipikor dan Sosialisasi HAM berjalan dengan baik karena menghadirkan narasumber yang kapabel sehingga penyampaian materi dapat diterima dengan baik dengan harapan dapat meningkatkan wawasan bagi peserta sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran yang

merupakan pelanggaran HAM yang sering kali terjadi pada perempuan dan anak-anak serta diharapkan pula peserta sosialisasi dapat menyebarkan pengetahuannya tersebut ke masyarakat lain agar dapat tetap waspada dan dapat berperan sebagai pelopor untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menjadi pelapor apabila telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di sekitar mereka. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja 100% pada indikator ini adalah upaya metode lain dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum misal melalui zoommeeting dsb. Tentunya hal ini perlu disediakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan tersebut.

Indikator ini didukung oleh program penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Produk Hukum Daerah/Desa.

- 2) Indikator penyelesaian sengketa hukum dihitung menggunakan jumlah sengketa hukum terselesaikan dibandingkan dengan jumlah total sengketa hukum yang masuk dikali 100%. Realisasi kinerja indikator ini mencapai 100% atau masuk kategori capaian kinerja **Baik**. Pada tahun 2020 ada 6 perkara yang ditangani baik perkara yang berproses dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung ataupun yang sudah inkraht atau putusan tetap. Perkara ini meliputi 2 perkara perdata dan 4 perkara Tata Usaha Negara. Perkara yang sudah inkraht ada 2 perkara dan 4 perkara lainnya masih proses banding, kasasi dan peninjauan kembali. Permasalahan pada indikator ini adalah jumlah perkara yang masuk tidak dapat diprediksi, serta penyelesaian kasus hukum/perkara belum tentu selesai dalam satu tahun anggaran karena adakalanya perkara yang diputus kemudian diajukan banding atau kasasi pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Penyelesaian pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi tidak bisa diperkirakan waktu putusan akhirnya. Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan pihak terkait dan selalu memantau perkembangan kasus hukum/perkara tersebut.

Indikator ini didukung oleh program penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

- 3) Indikator Terfasilitasinya penyusunan rancangan produk hukum daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan perhitungan capaian menggunakan

jumlah rancangan produk hukum yang terfasilitasi dibandingkan dengan jumlah total rancangan produk hukum dikali 100 dengan target 100%. Data 3 tahun terakhir untuk fasilitasi Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi

TAHUN	PHD	JUMLAH RANCANGAN PHD YANG TERFASILITASI	JUMLAH SELURUH PHD
2016	1. Perda	19	19
	2. Perbub	97	97
	3. SK	623	623
2017	1. Perda	14	20
	2. Perbup	90	76
	3. SK	891	891
2018	1. Perda	12	11
	2. Perbup	70	76
	3. SK	577	577
2019	1. Perda	11	15
	2. Perbup	80	78
	3. SK	2329	2329
2020	1. Perda	15	14
	2. Perbub	102	102
	3. SK	499	499

Sumber : Bagian Hukum Setda Kebumen, 2020.

Berdasarkan tabel diatas maka capaian kinerja tahun 2020 adalah **100%** atau kategori Baik. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dan Bagian Hukum (Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah) sehingga Produk Hukum Daerah yang diajukan dapat terfasilitasi untuk ditetapkan/diundangkan. Produk Hukum Daerah yang terselesaikan terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati melalui proses legal drafting dalam bentuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep serta adanya koordinasi dengan Perangkat Daerah. Perbedaan antara jumlah



PHD yang difasilitasi dan jumlah total PHD antarlain karena beberapa faktor, misalnya untuk tahun 2019, raperda yang diajukan melalui propemperda berjumlah 11 sedangkan yang menjadi Perda berjumlah 15, hal ini dikarenakan ada 4 raperda yang merupakan luncuran dari tahun 2018 yang diundangkan pada tahun 2019. Demikian juga untuk Tahun 2020, jumlah Raperda yang diajukan propemperda 15 perda tetapi yang ditetapkan hanya 14 Perda karena ada beberapa Perda inisiatif DPRD yang diperpanjang pembahasannya melewati tahun anggaran. Hal ini memerlukan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif agar nantinya penyusunan rancangan produk hukum daerah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Produk hukum selain Perda yaitu Perbup dan Keputusan Bupati penyelesaiannya sesuai dengan target dan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena adanya koordinasi yang intensif antara Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan Bagian Hukum, serta optimalisasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Bagian Hukum. Untuk tahun berikutnya upaya agar lebih efektif dan efisien, Perangkat Daerah diminta untuk menyusun daftar kebutuhan regulasi atau produk hukum yang akan dibuat dalam tahun berjalan baik karena adanya perintah peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan akan regulasi baru yang belum tersedia atau untuk menggantikan regulasi lama yang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat. Indikator ini didukung oleh program penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.

- 4) Indikator Meningkatnya kemudahan akses informasi hukum dihitung menggunakan rumus membandingkan jumlah produk hukum yang dipublikasikan dengan jumlah total produk hukum dikali 100% dengan target 80%. Bagian Hukum mempublikasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kedalam sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kebumen dengan realisasi indikator mencapai 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 125%. Kegiatan publikasi didukung sarana prasarana yang memadai dengan tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sehingga informasi produk hukum dapat diakses secara cepat dan akurat. Sistem Informasi JDIIH memerlukan maintenance atau perawatan, pemeliharaan dan perlindungan agar tidak mudah dihack atau diretas oleh pihak luar yang tidak bertanggungjawab.

Indikator ini didukung oleh program penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

**Sasaran 7 : “Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan”**

Sasaran Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Umum Setda Kebumen, 2020.

Sasaran meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintah didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja. Selengkapnya sebagai berikut:

1. Prosentase penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga yang sesuai kebutuhan (mencapai target), dengan perhitungan menggunakan persentase perbandingan jumlah permohonan yang masuk ke Bagian Umum Setda yang dapat dicukupi (melalui kegiatan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga), dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang masuk (pada penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga). Adapun capaian kegiatan penunjang indikator sasaran ini sejumlah 17 kegiatan yang semua

kegiatan berjalan lancar dan mencapai target 100%. Capaian kegiatan pendukung indikator sasaran ini rata rata capaiannya 100% atau kategori capaian kinerja **Baik** dan tidak ditemukan kendala yang berarti, selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. 17 Kegiatan Penunjang Indikator Sasaran Prosentase Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga yang Sesuai Kebutuhan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020			(% Target Akhir Renstra 2021	(% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
			Target (%)	Real (%)	% Capaian		
1	Tercukupinya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tercukupinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tercukupinya ATK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tercukupinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tercukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan per undang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tercukupinya Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tercukupinya Honorarium Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

16	Pelayanan RT KDH WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Umum Setda Kebumen, 2020.

2. Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target).

Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target), dengan menggunakan prosentase hasil perhitungan perbandingan antara jumlah permohonan yang masuk ke Bagian Umum Setda. yang dapat dicukupi (melalui kegiatan pendukung penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset), dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang masuk (pada urusan penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset). Adapun capaian kegiatan penunjang indikator sasaran ini sejumlah 5 kegiatan yang semua kegiatan berjalan lancar dan mencapai target 100%. Capaian kegiatan pendukung indikator sasaran ini rata rata capainnya 100% atau kategori capaian kinerja **Baik** dan tidak ditemukan kendala yang berarti, selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Kegiatan Penunjang Indikator Sasaran Prosentase Penyelenggaraan Urusan Perlengkapan dan Penataan Aset yang Sesuai Kebutuhan (Mencapai Target)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tercukupinya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tercukupinya Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeuleir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------	------

Sumber : Bagian Umum Setda Kebumen, 2020.

### Sasaran 8 : “Meningkatkan kualitas, pengelolaan barang”

Sasaran Meningkatkan kualitas, pengelolaan barang didukung oleh 2(dua) indikator kinerja, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tersedianya sarpras penunjang pelaksanaan tupoksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase bidang tanah pemda yang tersertifikat	52,98%	18%	29,7%	165%	19%	156,31%

Sumber : Bagian Umum dan Pemerintahan Setda Kebumen, 2020.

1. Indikator sasaran Tersedianya sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi capaian kinerjanya sebesar 100% atau kategori capaian kinerja **Baik**, dengan perhitungan menggunakan prosentase perbandingan jumlah permohonan RKBU yang masuk ke Bagian Umum yang dapat dicukupi (melalui kegiatan pengadaan belanja modal), dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang masuk (pada kegiatan pengadaan belanja modal). Adapun capaian kegiatan penunjang indikator sasaran tersebut dirinci sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.20 Kegiatan Penujang Indikator Sasaran Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Indikator Kinerja	R.Th 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian trhdp Target
			Target	Real	% Capaian		

							Akhir Renstra
1	Tercukupinya perlengkapan rumah jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Umum Setda Kebumen, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui capaian indikator kinerja kegiatan penunjang Peningkatan Pengelolaan Barang Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja yang pertama adalah tercukupinya perlengkapan rumah jabatan, capaian kinerja mencapai 100%. Tercukupinya perlengkapan rumah jabatan yang diperlukan dibagi jumlah kebutuhan perlengkapan rumah jabatan yang bisa dicukupi dikalikan 100%, meliputi kebutuhan perlengkapan rumah jabatan penunjang tugas dinas dan/fasilitas bagi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dan lainnya.
  - b. Indikator kinerja yang kedua adalah tercukupinya sarana dan prasarana kantor, capaian kinerja mencapai 100%, diperoleh berdasarkan hasil perhitungan antara jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang diperlukan dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang bisa dicukupi dikalikan 100%, meliputi kebutuhan sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan tugas dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen meliputi, komputer, laptop, printer, pendingin udara, dll.
2. Melalui pelaksanaan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, capaian kinerja urusan pertanahan diarahkan untuk capaian pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2020 aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang belum bersertifikat sebanyak 1.008 bidang, sedangkan realisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat pada tahun mencapai 300 bidang atau realisasi kinerja sebesar 29,7% dengan tingkat capaian kinerja 165% atau kategori **sangat baik**, hal ini melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu 19% . Dalam hal ini dari 2.250 bidang

tanah milik pemerintah Kebumen, yang telah bersertifikat sejumlah 1.242 bidang. Meskipun telah melampaui target RJMD, namun Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus melaksanakan penataan aset tanah tersebut dengan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen.

Anggaran untuk mendukung kinerja ini didukung Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan anggaran sebesar Rp. 638.453.000,00 dengan realisasi Rp. 591.811.812,00, atau realisasi anggaran 92,69 %.

### Sasaran 9 : “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah”

Sasaran meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Meningkatnya Efektifitas dan Efisien Kelembagaan Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi	CC*	B	CC*	93%	B	93%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen	B	B	B	100%	B	100%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020.

Capaian kinerja 3 (tiga) indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien dihitung dari jumlah pembentukan perangkat daerah yang dapat difasilitasi dibandingkan dengan jumlah usulan perangkat daerah. Indikator ini capaian kinerjanya mencapai 100% dengan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi OPD atau kategori capaian kinerja **Baik**. Adapun yang disusun meliputi :

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator Prosentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan indikator ini sebesar Rp. 87.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.083.774,- atau sebesar 93%.

2. Indikator sasaran Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi capaian kinerjanya 100% atau kategori capaian kinerja **Baik** (perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dari target yang ditetapkan nilai B dan terealisasi B (65,81) dengan catatan masih *self assessment* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online.

Dalam mendukung pelaksanaan PMPRB Online ini, diambil sampel dari Pusat (Pemerintah Kabupaten Kebumen) dan 10 (sepuluh) perangkat daerah yaitu:

- a. Bappenda
- b. BKPPD
- c. BPKAD
- d. Disarpus
- e. Disdukcapil
- f. Disnaker KUKM
- g. DPMPTSP
- h. Kecamatan Kebumen
- i. Puskesmas Karangsembung
- j. RSUD dr Soedirman

Pelaksanaan indikator ini melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, dengan jumlah anggaran Rp. 31.555.000,- realisasi Rp. 21.420.830,- atau 68%.



3. Indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen mencapai target. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen ditargetkan nilai B\* dan sudah mencapai target. Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kementerian PANRB, komponen yang dinilai meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian serta evaluasi. Nilai SAKIP Kabupaten tahun 2020 didasarkan pada nilai SAKIP tahun 2019 karena pada saat laporan ini dibuat Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 belum keluar sehingga asumsi realisasi adalah B (61,85) sudah mencapai target B atau capaian 100%. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan

Tabel 3.22 Perbandingan Nilai AKIP 2016-2019

No	Komponen	Bobot	TAHUN			
			2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	16,91	19,4	20,29	21,13
2	Pengukuran Kinerja	25	13,44	13,9	13,78	14,19
3	Pelaporan Kinerja	15	9,77	9	9,66	9,83
4	Evaluasi Internal	10	4,86	4,9	5,88	6,06
5	Capaian Kinerja	20	9,37	10,05	9,11	10,64
Nilai Hasil Evaluasi			54,35	57,26	58,73	61,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Penyusunan LKjIP Bupati berdasarkan IKU Bupati yang menjadi tanggung jawab beberapa Perangkat Daerah dalam analisis capaian kinerja belum semua OPD mendeskripsikan usaha/upaya/kendala dan solusi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

- 2) Update data kinerja pada website <http://e-sakip.kebumenkab.go.id/> belum semua OPD melaksanakan.

Solusi perbaikan pelaksanaan kegiatan:

- 1) Membentuk tim teknis yang beranggotakan dari OPD penanggung jawab IKU Bupati;
- 2) Menyusun rencana paparan kepala OPD terhadap capaian IKU Bupati dan IKU OPD 2021;
- 3) Mengupdate sistem e-sakip <http://e-sakip.kebumenkab.go.id/> yang tadinya entry data cukup upload dokumen.

Pelaksanaan kegiatan ini pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan indikator ini sebesar Rp. 53.553.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.418.384,- atau sebesar 98%

#### **Sasaran 10 : “Meningkatnya budaya kerja perangkat daerah”**

Sasaran meningkatnya budaya kerja perangkat daerah didukung oleh oleh 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian indikator sasaran ini mencapai 112% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah

No	Indikator sasaran	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase perangkat daerah yang telah mengembangkan budaya kerja	46% (24 PD)	50% (25 PD)	56% (29 PD)	112%	80%	57,5%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020.

Perangkat daerah yang mengembangkan budaya kerja ditargetkan 25 SKPD, realisasi berdasarkan monitoring dan evaluasi Laporan Evaluasi Kematangan Organisasi yang didalamnya ada Indikator Budaya Kerja Organisasi diketahui bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perangkat daerah yang telah mengembangkan budaya kerja sampai dengan level II yakni Sudah ada slogan-

slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perangkat daerah belum mengembangkan budaya kerja sehingga masih pada level I dengan arti Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.

Kendala yang dihadapi yaitu belum semua perangkat daerah menyusun risalah budaya kerja sebagai dasar pengembangan budaya kerja perangkat daerah dan keterbatasan SDM yang dapat melaksanakan tugas sebagai Analis Kinerja SDM yang bertugas secara teknis dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Guna meminimalisir kendala dimaksud, solusi perbaikan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun surat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja.

Pelaksanaan kegiatan ini pada Program pembinaan dan pengembangan aparatur kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan indikator ini sebesar Rp. 11.539.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.150.460,- atau sebesar 88%

**Sasaran 11 : “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan Publik”**

Sasaran meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Real	% Capaian		

1	UPP yang dievaluasi berpredikat baik	19,23%	15%	69,23 %	461,5%	65%	37,10%
2	Rata-rata Nilai kepuasan masyarakat	80,61	80	81,97 %	102,46%	80%	100,76%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020.

1. Indikator sasaran Unit Penyelenggaraan Pelayanan yang dievaluasi berpredikat baik, dengan target 15% atau sejumlah 4 UPP dari jumlah keseluruhan 26 UPP yang dilakukan evaluasi di tahun 2020. Indikator ini diperoleh dari membandingkan jumlah UPP yang berpredikat baik dengan jumlah seluruh UPP yang dilakukan evaluasi di 2020. Pada tahun 2020 terdapat 18 UPP yang telah berpredikat baik atau sebesar 69,23% dari target yang ditetapkan 15% sehingga capaian indikatornya sebesar 461,5% atau masuk kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Terdapat perbedaan interval kategori penilaian untuk kategori Baik. Jika di tahun 2016 dan 2017 mendasari pada Permenpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana kategori Baik mulai dari angka 60, maka pada tahun 2018 dan 2019 berpedoman pada Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori Baik dimulai dari 81.
2. Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dihitung dari nilai rata-rata kepuasan publik di unit pelayanan. Target Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh unit pelayanan publik tahun 2019 yaitu 80, dan terealisasi sebesar 81,97 sehingga capaian indikator ini 102,46 dengan kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Nilai tersebut merupakan hasil rekapitulasi perangkat daerah yang terdiri dari dinas, badan, kecamatan, kelurahan, UPTD Puskesmas dan Bank BPR Kebumen.

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sasaran yang dilaksanakan melalui program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran Rp 122.485.000,- Realisasi Rp 118.100.361,- atau 96%.

**Sasaran 12 : " Meningkatkan tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel"**

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang realisasi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pengendalian Pembangunan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

No	Indikator sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tingkat penyerapan/realisasi anggaran berjalan baik	91,88%	94%	91,90 %	97,76%	94%	97,74%
2	Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	90,78%	50%	94,38 %	188,76 %	50%	181,56%
3	Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kebumen, 2020.

1. Tingkat penyerapan/realisasi penyerapan berjalan baik adalah indikator yang menunjukkan penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen dengan perhitungan jumlah anggaran yang terserap dibandingkan perencanaan anggaran dengan target 94%. Realisasi indikator ini mencapai target 91,90% sehingga capaian indikator ini 97,76%. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih dari nilai kontrak pekerjaan dengan pagu anggaran dan terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan/ putus kontrak.

Keterangan : Sumber Data Draft LRA TA 2020 tanggal 7 Januari 2021

2. Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO (IKU) menunjukkan tingkat realisasi fisik dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan perhitungan capaian realisasi fisik dibanding dengan rencana yang ditentukan. Capaian indikator ini sebesar 188,76% dengan target 50%. Organisasi perangkat daerah

mencapai realisasi fisik sesuai rencana dibandingkan dengan seluruh organisasi perangkat daerah sebanyak 168 OPD dan terealisasi 94,38%. Indikator ini dicapai bersama dengan indikator penyerapan anggaran sehingga faktor yang mendukung dan menghambat sama dengan indikator penyerapan anggaran yaitu efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih dari nilai kontrak pekerjaan dengan pagu anggaran dan masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan/putus kontrak.

Kedua Indikator diatas, didukung oleh program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai program tersebut melalui Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan Rakor POP dan Laporan melalui aplikasi SIMPEL.

Tabel 3.26 Realisasi Penyerapan Anggaran Bagian Pembangunan Setda TA 2020

NO	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2020	REALISASI TA 2020
<b>A</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		
1	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbagian Infrastruktur	128.128.000,00	127.555.180,00
2	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebij	129.919.000,00	127.651.397,00
<b>B</b>	<b>Program pengembangan data/informasi</b>		
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.497.860,00	9.497.860,00
	Jumlah	267.550.000,00	264.704.437,00

- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan target 100%. Berdasarkan hasil kinerja pada tahun 2020 dari total 199 paket pengadaan yang difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa keseluruhannya dapat terealisasi sebesar 100% maksudnya semua rencana pengadaan telah berhasil difasilitasi sehingga

capaian indikator tercapai sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Baik. Seluruh paket pengadaan telah berhasil difasilitasi, akan tetapi ada 2 lelang pekerjaan yang gagal lelang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.27 Lelang Pekerjaan yang Gagal Lelang

No	Nama Paket	Alasan Gagal
1.	Belanja Jasa Konsultansi Laik Fungsi Bangunan RSUD dr. SOEDIRMAN	a. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi b. Tidak tersedia cukup waktu apabila dilaksanakan tender/seleksi ulang
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Poliklinik) RSUD dr. SOEDIRMAN	a. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi b. Tidak tersedia cukup waktu apabila dilaksanakan tender/seleksi ulang

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa, 2020.

Kedua paket gagal lelang tersebut sudah dilakukan tender namun gagal karena tidak ada yang memenuhi syarat prakualifikasi dan waktu yang tersedia untuk melakukan seleksi tidak mencukupi. Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100% dimaksud adalah paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pemilihan tender. Sedangkan untuk pengadaan langsung dan *e-purchasing* dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat penyerapan/realisasi anggaran pada indikator ini juga tercapai sesuai target karena didukung oleh perencanaan anggaran yang bagus, *team work* yang baik dan koordinasi yang optimal:

Indikator Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan merupakan Indikator Kinerja Utama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa didukung oleh Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 1.353.868.000,00 yang diuraikan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 1.210.018.000,00.
2. Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan anggaran sebesar Rp. 92.014.000,00.
3. Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 51.836.000,00.

Anggaran Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sebesar Rp. 1.210.018.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.342.254.474,00 atau 99,14%. Perbandingan dengan tahun 2019 dimana jumlah paket yang difasilitasi sejumlah 224 paket yang terealisasi 100%, tahun 2020 dengan realisasi sama yaitu 100% akan tetapi mengalami penurunan 25 paket pekerjaan yaitu sejumlah 199 paket.

Masalah yang muncul pada tahun 2020 dan solusi yang perlu dilakukan pada tahun 2021 sehingga permasalahan tidak muncul pada proses Pengadaan Barang Jasa dan kegiatan di Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu:

Tabel 3.28 Permasalahan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

No	Kasubbag	Permasalahan	Solusi
----	----------	--------------	--------



1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	a. Adanya pandemi covid-19 sehingga muncul realokasi anggaran hal ini menghambat proses Pengadaan Barang dan Jasa	a. Perlunya koordinasi dan perencanaan anggaran yang lebih optimal
2	Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE )	a. Struktur kelembagaan LPSE didukung 6 orang personil setelah bergabung dengan Bagian PBJ hanya didukung oleh 1 orang Kasubbag sehingga layanan pembuatan Akun PA/KPA, PPK, serta Pejabat pengadaan sering terkendala atau tidak dilayani dengan optimal.	a. Menambah personil sebanyak 6 orang PNS guna mendukung kelembagaan LPSE setelah bergabung dengan Bagian PBJ sehingga layanan pembuatan Akun PA/KPA, PPK, serta Pejabat pengadaan dapat berjalan dengan baik dan optimal
3	Advokasi dan Pembinaan	a. Berdasarkan Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paling lambat 31 Desember 2020 untuk Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa namun saat ini Anggota Pokja yang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan baru 2 (dua) orang dari 15 (lima belas) anggota Pokja yang ada, sehingga setidaknya 13 anggota Pokja yang lain perlu dilakukan Inpassing. b. Berdasarkan Pasal 88 huruf d Perpres 16 tahun 2018, paling	a. Perlu dilaksanakan inpassing Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana ke Jabatan Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. b. Perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan

		lambat 31 Desember 2023, personel yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa.	Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
--	--	---	--

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa, 2020

**Sasaran 14 : “Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan melalui media yang optimal”**

Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) indikator sasaran yaitu

1. Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
3. Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi
4. Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara-acara dinas Pemda

Rata-rata sasaran yang diperoleh sebesar 100% atau dalam kategori **Baik**.

Target dan realisasi dapat dilihat selengkapnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Pemanfaatan Melalui Media yang Optimal

No	Indikator sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Real	% Capaian		
1	Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas	4 kali	0	0	0%	29 Kali	0%

2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi	30 kali	24 kali	30 kali	100%	24 kali	100%
4	Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara-acara dinas Pemda	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Humas, 2020.

1. Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas

Pada tahun 2020, pencapaian pada indikator ini adalah 0%. Bagian Humas Setda Kebumen tidak lagi menerbitkan majalah Wamas. Hal ini disebabkan karena:

- a. Perpindahan kewenangan penerbitan majalah Wamas dari Bagian Humas Setda Kebumen ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen mulai tahun 2019;
  - b. Tidak adanya alokasi anggaran untuk menerbitkan lagi di tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas media guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi melalui media guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 mencapai 100%, dengan jumlah penyelenggaraan jumpa pers sebanyak 12 kali. Kegiatan jumpa pers ini dilaksanakan dengan menghadirkan wartawan/media dalam rangka menyebarkan informasi positif kepada publik/masyarakat tentang kebijakan pemerintah daerah, perkembangan pembangunan daerah, serta sebagai sarana meningkatkan citra yang positif guna menunjang seluruh

kegiatan pemerintah kabupaten sehingga masyarakat mengetahui kinerja pemerintah daerah. Selain sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat (*right to know*), tujuan diselenggarakannya jumpa pers adalah sebagai ajang silaturahmi dan kerjasama dengan insan media.

3. Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi

Indikator jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi target yaitu dari target 24 kali, teralisasi 30 kali sehingga capaian kinerjanya di atas 100%.

4. Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara- acara dinas Pemda

Indikator ini mencapai target yaitu dari target 24 kali, teralisasi 30 kali sehingga capaian kinerjanya di atas 100%.

#### Realisasi Anggaran

Anggaran pendukung sasaran Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan melalui media yang optimal pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 781.652.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 727.199.606,00 atau 93,03%

Tidak terserapnya anggaran 100% dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran karena Covid-19, tidak terselenggaranya kegiatan karena masih pandemi, efisiensi belanja narasumber cetak buku, anggaran yang sifatnya penyediaan, dan honor tenaga THL yang tidak bisa dibayarkan karena kurang dari 24 hari kerja.

#### **Sasaran 15 : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta tertib pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa”**

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu

1. Prosentase pelaksanaan sukses pemilu
2. Nilai EKPPD
3. Administrasi Pemerintahan dan pelayanan kecamatan baik

Realisasi dapat dilihat selengkapnya pada tabel dibawah ini

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Tertib Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase pelaksanaan sukses pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai EKPPD	3,91*	>3	3,91*	100%	>3	100%
3	Administrasi Pemerintahan dan pelayanan kecamatan baik	Baik	Baik	Baik	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2020.

1. Capaian kinerja Indikator sasaran prosentase pelaksanaan sukses pemilu sebesar 100% dari target dan realisasi 100%. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.  
Pada tahun 2020 berlangsung pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Kebumen. Bagian Pemerintahan selaku fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilu melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilu tersebut dari target 100% wilayah yang dimonitoring dan terealisasi 100%.
2. Capaian kinerja Indikator sasaran Nilai EKPPD  
Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Amanat tersebut mewajibkan kepada Pemerintah daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah hasil evaluasi mandiri Pemda, terhadap pelbagai dimensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan. LPPD disusun sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, yang berpatokan terhadap peraturan perundang-undangan. LPPD yang disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian akan dievaluasi kinerjanya oleh Tim EKPPD dibawah Kementerian

Dalam Negeri. Adapaun data yang dilaporkan mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah didesentralisasi ke daerah, pelaksanaan urusan yang didanai melalui tugas pembantuan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Evaluasi terhadap LPPD berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh menteri terkait sesuai dengan urusan dan kewenangan yang ada di daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Indikator yang dinilai terdiri dari :

- a. Indikator Tataran dalam pengambilan kebijakan
- b. Indikator Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum
- c. Tataran Pelaksana Kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan

Hasil evaluasi LPPD ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemingkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Perkembangan Capaian nilai EKPPD Kabupaten Kebumen yang ditetapkan dalam SK Mendagri sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	CAPAIAN TAHUN	NILAI EKPPD	KATEGORI	DASAR
1	2015	33,2232	Sangat Tinggi	Kepmendagri No. 120 – 10421 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2015
2	2016	3,1274	Sangat Tinggi	Kepmendagri No. 100-53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2019
3	2017	2,5236	Tinggi	KEPMENDAGRI NO.118-8840 TAHUN 2018 Tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2017
4	2018	3,3226	Sangat Tinggi	Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 2020

NO	CAPAIAN TAHUN	NILAI EKPPD	KATEGORI	DASAR
5	2019	-	-	Belum ada hasil evaluasi dari Tim Evaluasi Kinerja Pemereintah Daerah Tahun 2019

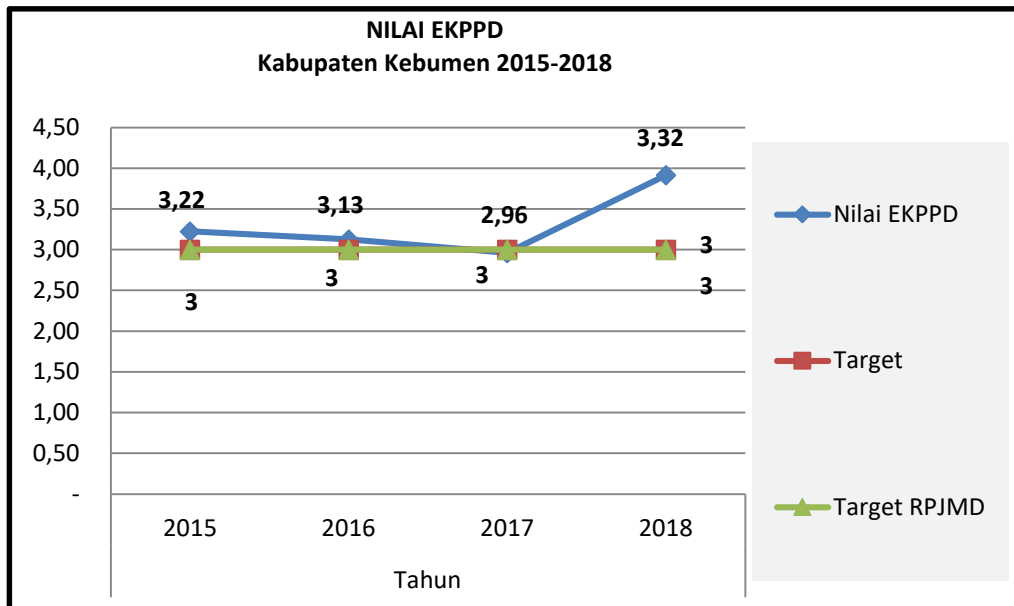
Sumber : Bagian Pemerintahan 2020

Realisasi Nilai EKPPD tahun 2020 didasarkan pada Nilai EKPPD tahun 2018 sebagaimana Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 2020 dengan nilai 3,3226 atau tercapai dengan realisasi sebesar 110,75% atau dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik**.

Kendala dalam evaluasi nilai EKPPD adalah keterlambatan hasil kinerja tahun n yang selalu diterbitkan Kementerian dalam negeri pada akhir tahun n+1, contohnya nilai EKPPD tahun 2018 disampaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, target nilai yang ingin dicapai adalah Baik/Tinggi, namun sampai dengan disusunnya laporan ini masih belum diterbitkan SK Mendagri tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2019. Sementara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2020 dan belum ada hasil evaluasi.

Berikut ini perkembangan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 serta target terhadap RJMD :

Grafik 3.5  
Nilai EKPPD 2015-2018



Sumber : Bag. Pemerintahan Setda Kebumen, 2020

Berdasarkan grafik diatas, indicator kinerja daerah Nilai EKPPD mencapai target, bahkan melebihi target sebesar 0,91. Terhadap target RPJMD indicator kinerja ini telah melebihi target pula. Grafik capaian nilai EKPPD mengalami penurunan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 terjadi kasus temuan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.118-8840 TAHUN 2018 Tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2017, pada Ketentuan Kesepuluh, Bagi daerah yang masuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional pada tahun 2017 mendapat pengurangan skor salah satunya pada huruf a “Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahnya ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 April 2017 baik yang sudah maupun belum mendapat putusan pengadilan tetap (*inkracht*).

Adapun beberapa hal yang sangat menghambat dalam pencapaian target adalah:

- 1) Kurangnya komitmen pimpinan dalam mencermati dan mengevaluasi data kinerja OPD



- 2) Kemampuan personil yang ditunjuk dalam penyusunan LPPD masih rendah.
- 3) Tidak adanya evaluasi mandiri OPD atas capaian kinerja yang dijadikan sebagai kelengkapan capaian kinerja daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai EKPPD pada tahun mendatang adalah dengan :

- 1) Intensifitas koordinasi dengan Kementrian dalam negeri dalam pemahaman juknis penyusunan dan perhitungan indicator kinerja;
  - 2) Dengan Pemerintah Provinsi Jawa tengah terkait kelengkapan dokumen LPPD
  - 3) Dengan OPD se Kabupaten Kebumen terkait kecepatan, ketepatan dan aktualisasi data dukung capaian kinerja.
  - 4) Bimbingan teknis penyusunan LPPD dengan menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri.
  - 5) Desk to desk secara langsung terhadap data dukung yang dihimpun oleh OPD
3. Indikator sasaran pelayanan publik kecamatan baik dihitung dari hasil monitoring di 26 kecamatan. Monitoring pelayanan kecamatan bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan pelayanan publik, memberi saran dan perbaikan untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelayanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Maksud dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yaitu sebagai acuan bagi penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik, aspek tersebut terdiri dari :
- 1) Kepentingan umum
  - 2) Kepastian Hukum
  - 3) Persamaan hak
  - 4) Keseimbangan hak dengan kewajiban
  - 5) Keprofesionalan
  - 6) Partisipatif
  - 7) Persamaan perlakuan
  - 8) Keterbukaan
  - 9) Akuntabilitas
  - 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

- 11) Ketepatan waktu
- 12) Kemudahan dan keterjangkauan

### **3.3. Realisasi Anggaran**

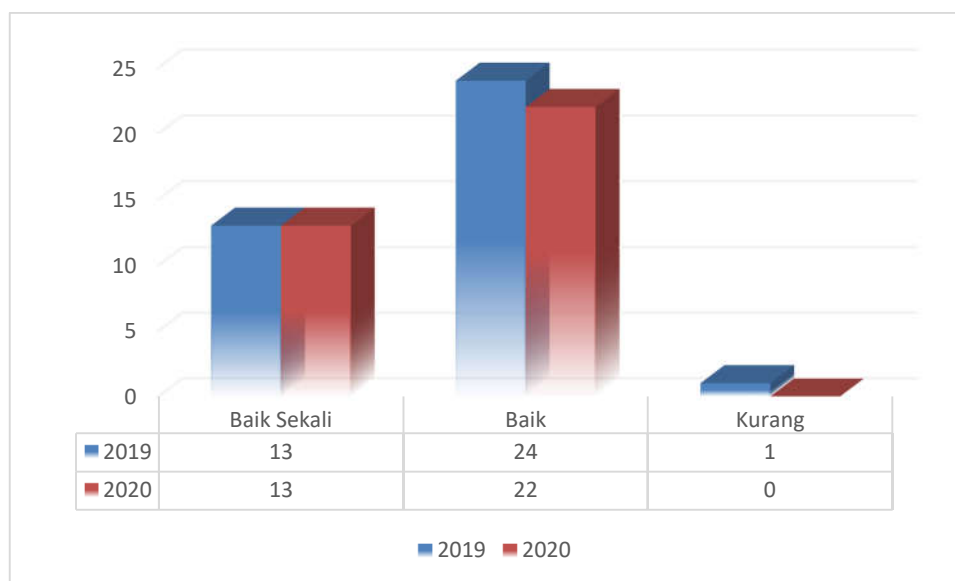
Akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat diketahui dari realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2020. Untuk Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 13.118.950.000,00 terealisasi 92,37% atau sebesar Rp 12.117.459.008,00. Kinerja keuangan tahun 2020 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang sebesar 89,23%, namun demikian kinerja *output* kegiatan pada tahun 2020 dapat mencapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Adapun secara rinci realisasi belanja per program/kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020 terlampir.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja 120%. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja diketahui bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran kategori **Baik Sekali**, 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kategori **Baik**, dan 1 (satu) indikator berpindah kewenangan ke Dinas Kominfo.

Sehingga dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja tahun 2020 (115%) lebih baik dari pada rata-rata capaian kinerja tahun 2019 (106%) Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Secara umum rata-rata capaian kinerja **Sangat Baik**. Namun demikian, ada 2 (delapan) indikator sasaran yang belum mencapai target dan berpindah kewenangan yaitu:

1. Prosentase Capaian prestasi pemuda dan olahraga;
2. Tingkat penyerapan /realisasi anggaran berjalan baik.

Ketidak berhasilan kedua indikator sasaran dalam mencapai target disebabkan karena oleh pandemi *Covid-19* yang berdampak pada pembatasan kegiatan sehingga penyerapan anggaran tidak tercapai.

#### 4.2. Solusi


Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan perbaikan sangat dibutuhkan untuk penyusunan LKjIP yang lebih baik. Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, adapun solusi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang adalah dengan tetap fokus pemulihan dampak *Covid-19*, mendukung kebijakan terkait pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun anggaran 2020, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD USANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196411171992011002

**LAMPIRAN**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2020**

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	115.872.000	102.673.530	88,61%
2	Program kerjasama informasi dengan mas media	538.481.000	494.052.330	91,75%
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.697.033.000	4.112.358.194	87,55%
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	98.804.000	91.234.234	92,34%
5	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	122.485.000	119.840.361	97,84%
6	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	638.453.000	591.811.812	92,69%
7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	585.189.000	554.474.848	94,75%
8	Program pengembangan data/informasi	9.503.000	9.497.860	99,95%
9	Program pengembangan wawasan kebangsaan	563.971.000	592.304.694	105,02%
10	Program peningkatan disiplin aparatur	279.841.000	265.635.006	94,92%
11	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	596.750.000	555.360.468	93,06%
12	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	149.819.000	141.857.985	94,69%
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.133.540.000	1.977.602.977	92,69%
14	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.589.209.000	2.508.754.709	96,89%
	<b>Total</b>	<b>13.118.950.000</b>	<b>12.117.459.008</b>	<b>92,37%</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205  
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. AHMAD UJANG SUGIONO,SH  
Jabatan : Sekretaris Daerah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : KH. YAZID MAHFUDZ  
Jabatan : Bupati Kebumen  
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

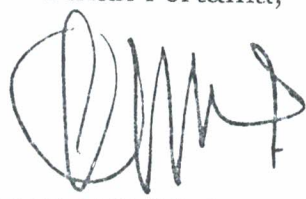
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 4 September 2020

Pihak Kedua,

  
KH. YAZID MAHFUDZ

Pihak Pertama,

  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
NIP. 196411171992011002

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN				
					I	II	III	IV	
		16	Meningkatnya kemudahan akses informasi hukum	80%	80%				80%
7	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	17	Prosentase penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%				100%
		18	Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%				100%
8	Meningkatkan kualitas, pengelolaan barang	19	Tersedianya sarpras penunjang pelaksanaan tupoksi	100%	100%				100%
		20	Persentase aset/bidang tanah pemda yang tersertifikat	18%	18%				18%
9	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	21	Prosentase Perangkat Daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%				100%
		22	Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi	B	B				B
		23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen	B	B				B
10	Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah	24	Prosentase perangkat daerah yang telah mengembangkan budaya kerja	78%	50%				50%
11	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	25	UPP yang dievaluasi berpredikat baik	15%	15%				15%
		26	Rata-rata Nilai kepuasan masyarakat	80%	80%				80%
12	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel	27	Tingkat penyerapan/realisasi anggaran berjalan baik	94%	94%				94%
		28	Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan	50%	50%				50%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIMULAN			
					I	II	III	IV
		capaian realisasi fisik sesuai target RKO						
		29 Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan	100%	100%				100%
13	Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan melalui media yang optimal	30 Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas	4%	4%				4%
		31 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%				100%
		32 Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi	24 kali	24 kali				24 kali
		33 Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara-acara dinas Pemda	100%	100%				100%
14	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta tertib pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa	34 Prosentase pelaksanaan sukses pemilu	100%	100%				100%
		35 Nilai EKPPD	>3	>3				>3
		36 Administrasi Pemerintahan dan pelayanan kecamatan baik	Baik	Baik				Baik

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	608.340.000	115.872.000
2.	Program kerjasama informasi dengan mas media	594.282.000	538.481.000
3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.751.970.000	4.697.033.000
4.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	365.370.000	98.804.000
5.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	309.160.000	122.485.000
6.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	384.806.000	638.453.000



7.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.424.427.000	585.189.000
8.	Program pengembangan data/informasi	14.000.000	9.503.000
9.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.277.738.000	571.796.000
10.	Program peningkatan disiplin aparatur	405.152.000	279.841.000
11.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	470.750.000	596.730.000
12.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	248.800.000	149.319.000
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.100.923.000	2.133.540.000
14.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHI	5.409.978.000	2.589.209.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>20.365.696.000</b>	<b>13.126.775.000</b>

Kebumen, 4 September 2020



Pihak Kedua,

KH. YAZID MAHFUD

Pihak Pertama,

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.

NIP. 196411171992011002

**PENGUKURAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya prestasi olah raga dan pembinaan kepemudaan	1 Prosentase Capaian prestasi pemuda dan olahraga	58,65%	55%	93%
2	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	2 Cakupan penemuan kasus baru HIV	90%	75,70%	116%
		3 Cakupan penanganan kasus pertikaian antar agama	100%	100%	100%
		4 Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	85%	85%	100%
		5 Persentase ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	875 Ponpes/ TPQ	915 Ponpes/ TPQ	104%
		6 Persentase gereja dalam kondisi baik	100%	100%	100%
		7 Persentase wihara dalam kondisi baik	100%	100%	100%
		8 Tingkat kepuasan pelayanan transportasi jamaah haji	0%	0%	-
3	Meningkatnya kinerja BUMD	9 Prosentase BUMD berpredikat sehat	80%	100%	125%
4	Meningkatnya kinerja bidang perindustrian,	10 Jumlah lembaga keuangan, perdagangan, koperasi dan UMKM koperasi, dan usaha kecil menengah yang terfasilitasi	50 UMKM	50 UMKM	100%
		11 Jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	30 UMKM	30 UMKM	100%
5	Terkoordinasinya distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi	12 Prosentase wilayah distribusi raskin, BBMG, dan pupuk bersubsidi	72%	80%	111%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum kabupaten dan desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan serta budaya hukum masyarakat	13 Meningkatnya budaya hukum di lapisan masyarakat	80%	80%	100%
		14 Penyelesaian sengketa hukum	100%	100%	100%
		15 Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%
		16 Meningkatnya kemudahan akses informasi hukum	80%	100%	125%
7	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	17 Prosentase penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%	100%
		18 Prosentase penyelenggaraan urusan perlengkapan dan penataan aset yang sesuai kebutuhan (mencapai target)	100%	100%	100%
8	Meningkatkan kualitas, pengelolaan barang	19 Tersedianya sarpras penunjang pelaksanaan tupoksi	100%	100%	100%
		20 Persentase aset/bidang tanah pemda yang tersertifikat	18%	29,70%	165%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	21 Prosentase Perangkat Daerah dengan kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%	100%
		22 Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi	B	B	100%
		23 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen	B	B	100%
10	Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah	24 Prosentase perangkat daerah yang telah mengembangkan budaya kerja	50% (25 PD)	6% (29 PD)	112%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	25 UPP yang dievaluasi berpredikat baik	15%	69,23%	461,50%
		26 Rata-rata Nilai kepuasan masyarakat	80%	81,97%	102,46%
12	Meningkatnya tertib administrasi perendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel	27 Tingkat penyerapan /realisasi anggaran berjalan baik	94%	91,90%	97,76%
		28 Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	50%	94,38%	188,76%
		29 Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui layanan pengadaan	100%	100%	100%
13	Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan melalui media yang optimal	30 Jumlah publikasi kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kebumen melalui majalah Wamas	-	0	0
		31 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%
		32 Jumlah layanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan tamu dinas yang terfasilitasi	24	30	125%
		33 Terpenuhinya pelayanan tamu dinas dan acara- acara dinas Pemda	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta tertib pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa	34 Prosentase pelaksanaan sukses pemilu	100%	100%	100%
		35 Nilai EKPPD	>3	3,3198*	110%
		36 Administrasi Pemerintahan dan pelayanan kecamatan baik	Baik	Baik	100%
Rata-rata					115%

Kebumen, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGTONO, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 196411171992011002